

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUMAS

Dita Islamiati*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Indonesia

*Corresponding author: ditaislamiati169@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 20-02-2024
Revised : 07-03-2024
Accepted : 16-05-2024
Published : 24-12-2024

Keywords:

Collaborative governance,
stakeholders, waste
management.

ABSTRACT

This research aims to analyse collaborative governance in waste management in Banyumas Regency. Strengthening collaboration involving the government, private and community sectors is needed in waste management so that all stakeholders have a sense of responsibility and synergy to solve waste problems. This research uses qualitative methods, data collected through interviews, observation and documentation. The results of this study show that waste management efforts in Banyumas Regency have run optimally seen from the indicators of network structure, commitment to common purpose, governance and information sharing. The conclusion of this research is that collaborative governance can be used as an approach in solving sustainable and effective waste problems

PENDAHULUAN

Sampah pada era sekarang ini telah menjadi persoalan yang tidak ada habisnya untuk dibicarakan. Berbagai solusi yang diberikan oleh pemerintah belum dapat mengatasi persoalan ini dengan tuntas dan bahkan solusi yang ditawarkan terkadang mendapat penolakan dari masyarakat. Hal ini yang membuat persoalan sampah semakin rumit baik dari segi sosial maupun dilihat dari segi lingkungan. Solusi yang sangat banyak dilakukan oleh pemerintah yakni membuat tempat pembuangan akhir di setiap daerah, namun ini tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada karena di dalam TPA tersebut sampah hanya dibuang dan

seiring berjalannya waktu sampah akan menggunung tinggi karena tidak dikelola dengan baik.

Ada beberapa permasalahan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia, menurut Chaerul at all (2007) permasalahan yang muncul adalah kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Sedangkan menurut Kardono (2007:631) berpendapat bahwa permasalahan pengelolaan sampah dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu tingginya jumlah

sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan masalah biaya.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tak terlepas dari persoalan sampah. Hingga pada tahun 2018 menjadi titik dimana Kabupaten Banyumas mengalami darurat sampah. Kondisinya kurang lebih sama dengan yang diutarakan oleh ahli di atas dimana belum tepatnya sistem pengelolaan sampah di TPA, tingginya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, masalah biaya hingga penegakkan hukum yang kurang tegas.

Seiring pertambahan penduduk yang semakin tinggi, maka akan berdampak pada peningkatan volume sampah yang diproduksi setiap hari. Pada kondisi yang sama kesadaran masyarakat akan pembuangan dan pengelolaan sampah masih rendah membuat persoalan sampah ini semakin kompleks. Penduduk yang semakin bertambah, kegiatan manusia yang semakin beragam akan berdampak pada volume timbulan sampah.

Bukti nyata bahwa padatnya jumlah penduduk terhadap tingkat volume sampah dapat dilihat pada tabel 1. berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
Kota Semarang	1.181,06	431.085,22
Kabupaten Brebes	1.005,31	366.937,60
Kabupaten Grobogan	838,53	306.061,73
Kabupaten Tegal	690,73	252.115,34
Kabupaten Pati	674,59	246.223,89
Kabupaten Klaten	643,02	234.703,44
Kabupaten Pemalang	593,68	216.694,51
Kabupaten Sragen	590,18	215.417,38
Kabupaten Banyumas	536,89	195.964,49
Kabupaten Semarang	529,92	193.421,53

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2022

Dari tabel tersebut dapat dilihat sepuluh kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terpadat. Apakah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan penduduk terpadat memproduksi sampah dengan volume yang

tinggi pula? Jawabannya dapat diketahui pada tabel 2.

Tabel 2. Volume Timbulan Sampah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa)	
	2021	2022
Provinsi Jawa Tengah	36.742.501	37.032.410
Kabupaten Brebes	1.992.685	2.010.617
Kabupaten Cilacap	1.963.824	1.988.622
Kabupaten Banyumas	1.789.630	1.806.013
Kota Semarang	1.656.564	1.659.975
Kabupaten Tegal	1.608.611	1.623.595
Kabupaten Pemalang	1.484.209	1.500.754
Kabupaten Grobogan	1.460.873	1.470.150
Kabupaten Kebumen	1.361.913	1.376.825
Kabupaten Pati	1.330.983	1.339.572
Kabupaten Magelang	1.305.512	1.312.573

Sumber : SIPSN Tahun 2022

Kabupaten Banyumas sebagai salah satu kabupaten dengan kepadatan penduduk yang tinggi memiliki timbulan sampah yang tinggi pula, itu dapat dilihat dari dua tabel di atas. Namun dengan hal tersebut tidak menjadi serta merta menjadikan Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten yang memiliki pengelolaan sampah yang buruk.

Kabupaten Banyumas sebagai salah satu kabupaten dengan kepadatan penduduk yang tinggi memiliki timbulan sampah yang tinggi pula, itu dapat dilihat dari dua tabel di atas. Namun dengan hal tersebut tidak menjadi serta merta menjadikan Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten yang memiliki pengelolaan sampah yang buruk.

Tabel 3. Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Prosentase Sampah Terkelola (%)
Kota Semarang	431.085,22	99,06
Kabupaten Brebes	366.937,60	13,89
Kabupaten Grobogan	310.021,75	52,13
Kabupaten Demak	263.666,36	13,14
Kabupaten Tegal	252.115,34	78,67
Kabupaten Pati	246.223,89	51,15
Kabupaten Klaten	234.703,44	55,64
Kabupaten Pemalang	216.694,51	85,38
Kabupaten Sragen	215.417,38	43,96
Kabupaten Banyumas	195.964,49	99,31

Sumber : SIPSN Tahun 2022

Dari tabel 3. dapat dilihat bahwa Kabupaten Banyumas masuk kedalam sepuluh kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan timbulan sampah yang tinggi, namun perlu dilihat juga bahwa Kabupaten Banyumas dapat melakukan pengelolaan sampah hingga prosentase 99,31% yang artinya sudah mendekati kondisi atau level *zero waste*.

Perlu diketahui juga bahwa Kabupaten Banyumas berusaha melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah. Kabupaten Banyumas melakukan pengelolaan sampah dengan memperhatikan aspek lingkungan atau berbasis lingkungan. Tentunya hal tersebut masih jarang dilakukan di Indonesia sebagian besar pengelolaan sampah TPA di Indonesia menggunakan metode *open dumping* dan *landfill*, namun ada juga metode lain yaitu pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan, dan daur ulang meskipun tidak banyak digunakan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas membangun tempat instalasi pembakaran menggunakan mesin pirolisis dengan menggandeng Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didirikan di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor. Tempat instalasi tersebut kemudian dinamakan Tempat Pemrosesan Akhir

Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE). Lebih lanjut lagi, hasil pembakaran sampah yang dilakukan di TPA BLE selanjutnya diolah menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomis. Sampah akan dikelola menjadi produk seperti paving block, RDF (*refuse delivered fuel*), kompos, pakan maggot serta produk daur ulang lainnya.

Seiring dengan inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan sampah juga harus diimbangi dengan fasilitas pengelolaan sampah sebagai tempat pengelolaan sampah yang terpadu dan tentunya berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Banyumas berusaha mengawali langkah dengan membangun fasilitas sampah yang baik. Fasilitas pengelolaan sampah yang didirikan tentunya mengedepankan prinsip daur ulang sampah atau dengan kata lain sampah yang dibuang ke fasilitas pengelolaan sampah akan diolah di tempat tersebut dan tidak dibiarkan menumpuk membung tinggi. Fasilitas yang dimaksud seperti Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), kemudian meluncurkan aplikasi Salinmas (sampah online Banyumas), dan aplikasi Jeknyong. Dengan upaya tersebut harapannya pengelolaan sampah dapat dilakukan dari hulu hingga ke hilir.

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dapat dikelola dengan baik, bahkan Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Banyumas dipercaya menjadi narasumber atau pembicara mengenai cara pengelolaan sampah di daerah yang dipimpinnya sampai menembus kancah Internasional yakni dalam Forum Konferensi Perubahan Iklim "Conference of Parties" 27 di Mesir pada 11-18 November 2022 dan Forum Smart Green ASEAN Cities (SCAG) City Windows di Bangkok, Thailand pada 6-8 Desember 2022 lalu. Selain itu, Kabupaten Banyumas juga telah dijadikan rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah. Kurang lebih sudah ada sekitar 160 daerah yang datang untuk studi mengenai pengelolaan sampah yang

dilakukan oleh Kabupaten Banyumas (sumber: pra survey Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas 26 Mei 2022).

Prestasi lain yang didapatkan oleh Kabupaten Banyumas dalam bidang kebersihan lingkungan yakni menyabet Piala Adipura sebanyak lima kali secara berturut-turut sekaligus mendapat penghargaan Plakat Adipura untuk TPS3R terbaik yang diterima pada Februari lalu. Lebih membanggakan lagi, Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah kegiatan forum dialog City Window Series (CWS) II yang diselenggarakan oleh Program Smart Green ASEAN Cities (SGAC).

Konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas secara garis besar dilakukan dengan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas setidaknya sudah melibatkan tiga elemen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Adapun tugas-tugas stakeholder tersebut dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sebagai berikut.

1. Pemerintah

Tugas pemerintah terdiri dari :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
- d. melaksanakan dan/atau memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- e. mendorong dan/atau memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah

g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

2. Swasta

Swasta yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah adalah Koperasi Resik Sejahtera Abadi. Pihak swasta ini memiliki peran untuk turut melakukan pengelolaan sampah hingga sampah menjadi produk yang nantinya produk hasil olahan sampah akan dijual kepada pihak luar.

3. Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, antara lain :

- a. Pemilahan sampah
- b. Pengumpulan sampah
- c. Pengangkutan sampah
- d. Pengolahan sampah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting untuk diteliti apa indikator keberhasilan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Hal ini penting untuk dilakukan agar daerah lain yang hendak mengaplikasikan konsep pengelolaan sampah yang serupa dengan yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas memperhatikan indikator-indikator yang menjadi faktor keberhasilan.

Collaborative Governance

Menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan.

Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007) merupakan serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset. Sedangkan menurut Holzer et al (2012:349), *collaborative*

governance merupakan kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai tujuan bersama untuk masyarakat.

Manajemen Pengelolaan Sampah

Manajemen sampah adalah gabungan dari kegiatan pengontrolan jumlah sampah yang dihasilkan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan sampah di TPA yang memenuhi prinsip kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi dan pertimbangan lingkungan yang juga responsif terhadap kondisi yang ada.

Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengupayakan agar kondisi sampah di Kabupaten Banyumas berada di level *zero waste*. Kabupaten Banyumas menggunakan pengolahan sampah dengan mengedepankan wawasan lingkungan dengan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).

Manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dapat diuraikan dalam skema sebagai berikut :

1. Pemilahan sampah oleh masyarakat atau oleh sumbernya
2. Pengumpulan dilakukan oleh pengelola kawasan atau KSM terdekat yang sudah dibentuk dan mengelola suatu fasilitas pengelolaan sampah.
3. Pengangkutan sampah dilakukan oleh KSM ke fasilitas pengelolaan sampah terdekat seperti TPST, TPS3R, Bank Sampah maupun Pusat Daur Ulang (PDU). Sampah juga dapat disalurkan dengan menggunakan aplikasi Salinmas dan Jeknyong agar sampah dapat tertangani dari hulu hingga hilir dan sampah tersebut juga bernilai rupiah.
4. Pengolahan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun oleh KSM pada tempat fasilitas pengolahan sampah.
5. Pemrosesan akhir di Kabupaten Banyumas dilakukan di TPA BLE, dari hasil residu TPST, TPS3R. Residu tersebut akan diolah kembali, sampah organik akan dijadikan

kompos maupun maggot dan sampah anorganik akan dijadikan bubur sampah dan dapat dimanfaatkan menjadi produk seperti *paving block*, genteng dan lainnya.

Indikator Keberhasilan Collaborative Governance

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan berhasil. Kabupaten Banyumas telah menjadi rujukan daerah lain atau dapat dikatakan menjadi tempat studi banding dalam pengelolaan sampah dalam skala nasional. Melihat best practice pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, maka menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian mengenai faktor keberhasilan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat dilihat menggunakan adaptasi Collaborative Governance milik Desave. Ada 8 indikator keberhasilan kolaboratif governance yang dikemukakan oleh De Save, yaitu :

1. *Network Structure*
2. *Commitment to common purpose*
3. *Trust among the participants*
4. *Governance*
5. *Access to authority*
6. *Distributive accountability/responsibility*
7. *Information sharing*
8. *Access to resource*

Penelitian Hidayanti (2020) menggunakan teori milik Desave untuk menilai pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta dan dapat diketahui bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut belum efektif. Kemudian juga ada penelitian Ikram (2020) yang mengkaji collaborative governance dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Kecamatan Manggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di tempat tersebut sudah cukup baik dimana sebagian besar indikator yang dikemukakan oleh Desave sudah terpenuhi.

Posisi penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yakni penelitian ini akan condong kepada best practice atau keberhasilan pengelolaan sampah dari perspective collaborative governance yang dilakukan di Kabupaten Banyumas. Peneliti terdahulu menggunakan indikator keberhasilan collaborative governance untuk melihat bahwa yang kolaborasi sudah dilakukan dengan optimal atau belum optimal, namun pada penelitian ini indikator keberhasilan akan digunakan sebagai faktor keberhasilan kolaborasi yang ada di Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sampah.

Dapat ditekan lagi bahwa penelitian ini akan meneliti apa indikator keberhasilan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas berbeda dengan literature review yang lebih banyak meneliti mengenai optimalisasi collaborative governance. Harapan dari adanya penelitian ini adalah dapat dijadikan acuan bagi daerah lain yang akan mengadapatasi konsep pengelolaan sampah Kabupaten Banyumas agar memperhatikan juga indikator keberhasilan yang ada.

Dalam penelitian ini akan mengadaptasi indikator keberhasilan yang dikemukakan oleh De Save namun dengan memfokuskan pada *network structure, commitment to common purpose, governance, information sharing dan access to resources* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

Fokus utama pada penelitian ini adalah collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dengan aspek-aspek seperti di bawah ini :

1. Network Structure

Network structure atau struktur jaringan yang ingin dilihat dalam penelitian ini yakni bagaimana bentuk struktur jaringan yang ada, apakah ada hierarki atau sifat yang top down atau mungkin ada monopoli dari satu pihak atau tidak.

a. Kolaborasi stakeholder

Pada penelitian ini akan dilihat seperti apa kolaborasi dilakukan dan mengapa harus dilakukan kolaborasi.

b. Sinergitas stakeholder

Sinergitas akan dilihat dari kebersamaan atau keterpaduan para stakeholder seperti komunikasi dan koordinasi yang dilakukan.

2. Commitmen to common purpose

Komitmen untuk mencapai tujuan dalam hal ini akan dilihat atau diturunkan lagi menggunakan sub aspek yakni :

a. Tujuan bersama

Tujuan bersama dalam hal ini adalah apakah para stakeholder memiliki satu visi misi atau tujuan yang sama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

b. Komitmen

Penelitian ini akan melihat apakah pandangan para aktor yang terlibat sudah memiliki komitmen atau konsistensi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

3. Governance

Indikator ini akan digunakan untuk melihat bagaimana tata kelola yang dipraktikkan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Secara detail akan dilihat pada aspek berikut ini :

a. Transparansi

Transparansi akan dilihat dari keterbukaan masing-masing pihak dalam melakukan perannya.

b. Akuntabilitas

Sub aspek akuntabilitas akan dinilai dari pertanggungjawaban stakeholder dalam melakukan peranannya dalam pengelolaan sampah.

c. Partisipasi

Penilaian partisipasi akan dilihat dari siapa saja yang berpartisipasi dan sejauhmana partisipasi dilakukan oleh masing-masing aktor.

4. Information Sharing

Indikator ini akan melihat bagaimana informasi dibagikan kepada setiap aktor yang terlibat.

a. Kemudahan akses

Kemudahan akses akan dilihat apakah akses data informasi yang dibutuhkan atau diberikan dapat diberikan dengan mudah.

5. Access to Resources

Akses sumber daya yang dimaksud dalam hal ini yakni bagaimana ketersediaan sumber daya yang ada pada masing-masing lingkungan stakeholder.

a. Sumber daya manusia

Penelitian ini akan melihat bagaimana sumber manusia yang ada, apakah sudah cukup memadai untuk melakukan pengelolaan sampah.

b. Sumber daya finansial

Keuangan adalah salah satu hal yang paling krusial dalam melakukan kegiatan. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana ketersediaan dana yang ada dan berasal darimana saja sumber dana tersebut.

c. Sumber daya sarana dan prasarana

Selain sumber daya manusia dan keuangan, sumber daya sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan tentunya untuk teknis pengolahan sampah yang dilakukan, karena tidak serta merta sumber dana yang cukup akan berbanding lurus dengan ketersediaan sarana dan prasarana, terkadang ada kendala lain yang membuat sarana dan prasarana itu belum memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada argumen bahwa Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Penentuan informan tersebut sudah sesuai kaidah teknik purposive sampling dimana orang-orang tersebut dianggap paling mengetahui mengenai informasi-informasi penting dalam penelitian ini. Informan yang dipilih tentunya sudah mewakili unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Informan tersebut antara lain :

1. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
2. Pejabat Fungsional Teknis Tata Kelola Penyehatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
3. Kepala Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi
4. Koperasi Produksi Sampah Resik Sejahtera Abadi
5. Pengelola Bank Sampah Inyong
6. Kelompok Swadaya Masyarakat Randu Makmur
7. Kelompok Swadaya Masyarakat Kedung Mas
8. Kelompok Swadaya Masyarakat Green Saber

Langkah-langkah penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Data yang didapatkan kemudian dilaukan analisis dengan menggunakan analisis interaktif Miles Huberman.
3. Setelah data dianalisis selanjutnya dilakukan validasi data dengan triangulasi sumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance merupakan suatu paradigma dalam administrasi publik, istilah

governance ini muncul menggantikan government dalam paradigma Old Public Administration dan paradigma New Public Management. Pada era saat ini collaborative governance telah menjadi fenomena dalam tata kelola pemerintahan. Collaborative governance ini dalam praktiknya melibatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pengelolaan pemerintahan. Kolaborasi yang dilakukan dimaksudkan agar tercipta kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola urusan pemerintahan, karena untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance tidak bisa dilakukan oleh satu aktor saja namun membutuhkan bantuan pihak lain dalam bentuk kolaborasi untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Penelitian Hidayanti (2020) menggunakan teori milik Desave untuk menilai pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta dan dapat diketahui bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut belum efektif. Kemudian juga ada penelitian Ikram (2020) yang mengkaji collaborative governance dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Kecamatan Manggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di tempat tersebut sudah cukup baik dimana sebagian besar indikator yang dikemukakan oleh Desave sudah terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan urusan pengelolaan sampah mempraktikkan *collaborative governance* dalam perjalanannya. Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya yang dapat dibingkai menjadi pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

Keunggulan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yakni konsep pengelolaan sampah yang zero to landfill artinya sudah tidak ada sampah yang diangkut dan dibuang begitu

saja pada lahan terbuka dan kini juga Kabupaten Banyumas tidak memiliki TPA (Tempat Pembuangan Akhir) karena sampah yang ada sudah dikelola dan menjadi beberapa produk. Keunggulan lainnya yakni produk hasil olahan sampah yang dapat dihasilkan yakni meliputi paving block, genteng, maggot, kompos, RDF yang tentunya memiliki nilai ekonomis. Selain mengatasi masalah sampah yang ada, pengelolaan yang dilakukan juga menghasilkan nilai tambah lain dan tidak boleh dilupakan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan juga ramah lingkungan.

Atas dasar kondisi diatas maka penelitian collaborative governance pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas menarik dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi untuk mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kunci atau indikator keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

1. Network structure

Menurut De Save, struktur jaringan merupakan deskripsi konseptual dari hubungan satu elemen dengan elemen lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan elemen fisik dari jaringan yang ditangani. Kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Koperasi, TPA BLE, KSM, Bank Sampah yang sudah mencakup tiga elemen yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Stakeholder tersebut memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kolaborasi pengelolaan sampah yang ada. Dinas sebagai regulator, KSM sebagai operator, dan Koperasi sebagai badan yang mengelola hasil sampah untuk pemasaran. Semua pihak yang berkolaborasi ini melakukan pertanggungjawaban dengan versinya masing-masing. Pihak-pihak tersebut memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Dinas Lingkungan Hidup, namun hanya sekadar untung memberi tembusan, tidak ada intervensi dari hasil laporan tersebut.

2. Commitment to common purpose

Commitment to a common purpose menjelaskan bahwa di dalam menjelaskan collaborative governance harus ada komitmen diantara para stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Komitmen menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan dan keberlanjutan suatu program atau kegiatan karena dengan adanya komitmen yang baik maka akan terjadi konsistensi dan akan berdampak pada keberlanjutan suatu program.

Komitmen yang dimiliki oleh para stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah sudah menunjukkan hal yang baik, semua pihak berkomitmen dalam pengelolaan sampah sesuai porsinya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk terus mengembangkan pengelolaan sampah yang baik, terus berinovasi, melakukan perbaikan atau pengadaan sumber daya, memperluas kerja sama dengan pihak lain agar tercapai tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas untuk zero waste. Kelompok swadaya masyarakat juga dalam perannya sebagai operator dalam pengelolaan sampah terus berkomitmen untuk menjalankan tugas yang dimilikinya agar sampah semaksimal mungkin terolah dan menciptakan zero waste. Kemudian untuk pihak swasta juga berkomitmen dalam pengelolaan sampah dalam hal manajemen hasil olahan sampah sesuai amanat yang diberikan dan tentunya memperluas jaringan atau sasaran pemasaran.

Dengan adanya komitmen yang dimiliki setiap pihak yang berkolaborasi maka pencapaian tujuan akan semakin mudah untuk dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas adalah dampak dari komitmen yang dimiliki oleh para pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah.

3. Governance

Dalam indikator governance, Desave menjelaskan bahwa dalam melaksanakan

program kolaborasi harus menekankan kepada kejelasan tata kelola program kolaborasi yang akan dijalankan. Meliputi kejelasan siapa saja anggota dalam pelaksanaan collaborative governance, kejelasan informasi dan kejelasan dalam pertanggungjawaban.

Indikator governance pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas diukur melalui prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Dalam penerapannya semua pihak melakukan atau melaporkan pertanggungjawaban kegiatannya. Mereka juga terbuka dengan segala kegiatan yang mereka lakukan yang sudah tertuang dalam laporan pertanggungjawaban yang berisi berbagai informasi di dalamnya. Kemudian untuk partisipasi, sudah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sudah terlibat dalam urusan ini.

Dapat dinilai dari aspek-aspek tersebut jika indikator governance dalam pengelolaan sampah sudah baik. Hal hal tersebut tentunya perlu dilakukan dalam kolaborasi agar tercipta tata kelola kolaborasi yang baik atau good governance.

4. Information sharing

Dalam indikator information sharing Desave (2009) menjelaskan bahwa program kolaborasi harus menjamin adanya penyebaran dan informasi terkait program kolaborasi kepada pihak di luar lembaga yang terlibat. Namun lebih dari itu, dalam prakteknya juga terdapat penyampaian atau sharing informasi antar stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sebagai sarana menyampaikan pendapat di dalam forum. Dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan langsung dilakukan dengan sosialisasi dan musyawarah dalam forum kemudian pendekatan secara tidak langsung melalui media sosial yang dimiliki.

Jika dilihat dari indikator information sharing yang menekankan pada penyebaran informasi kepada pihak lain, maka kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sudah memenuhi indikator tersebut karena informasi dapat diakses oleh masyarakat baik melalui interaksi langsung dalam sosialisasi dan musyawarah atau melalui platform media sosial.

Kondisi information sharing yang sudah baik akan berdampak pada pengelolaan sampah. Masyarakat dapat memaknai dan mendapat edukasi bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Lebih dari itu, information sharing juga dapat menjadi salah satu jalan untuk promosi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas. Selain itu forum yang digunakan untuk berbagi informasi juga dapat memperlancar komunikasi stakeholder, evaluasi kegiatan serta respon yang cepat. Dengan begitu pengelolaan sampah akan berjalan secara dinamis.

5. Access to resources

Pada indikator access to resources Desave menjelaskan adanya ketersediaan sumber daya sebagai dukungan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya sarana dan prasarana. Semua kegiatan yang dilakukan membutuhkan sumber daya tersebut untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan yang akan dilakukan dalam hal ini adalah pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sangat membutuhkan sumber daya tersebut dalam pelaksanaannya. Sumber daya manusia diperlukan sebagai motor atau penggerak suatu kegiatan, sumber daya finansial diperlukan untuk membiayai operasional kegiatan sedangkan sumber daya sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung dan menunjang kegiatan yang dilakukan. Saat ini sumber daya yang dimiliki dalam pengelolaan sampah sudah cukup bagus walaupun pada kenyataannya

dalam penerapan kegiatan ini masih diperlukan lebih banyak lagi sumber daya manusia yang ada. Sumber daya finansial tentunya sudah dianggarkan sendiri dari APBD Kabupaten Banyumas sesuai porsinya masing-masing, disamping itu stakeholder lain juga bisa mencukupi finansial mereka dari sumber lain dan tidak bergantung dari pemerintah. Sedangkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, Kabupaten Banyumas sudah banyak memiliki tempat fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Pusat Daur Ulang yang memang dibangun oleh pemerintah sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah sampah yang muncul pada tahun 2018 dan juga pengadaan mesin-mesin pengolah sampah. Namun kembali lagi, semuanya itu butuh proses walaupun pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sudah berbasis mesin modern namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas masih kurang memadai baik dari peralatan (mesin pengolah sampah) maupun tempat pengelolaan sampah.

Berdasarkan penelitian maka dapat dilihat bahwa indikator keberhasilan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas adalah network structure, commitment to common purpose, governance, dan information sharing.

Diharapkan indikator dapat dijadikan acuan bagi daerah lain yang akan mangedaptasi bagaimana cara Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengelolaan sampah khususnya dengan pendekatan collaborative governance.

KESIMPULAN

Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sudah berjalan optimal hal ini berdasarkan beberapa indikator dari Teori Desave sebagai berikut :

1. Network Structure

Network structure yang ada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sudah tinggi

baik dari sub aspek kolaborasi maupun sinergitas sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat mencapai keadaan *zero waste to landfill* dengan lebih cepat.

2. *Commitment to common purpose*

Commitment to purpose dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sudah tinggi. Para *stakeholder* mengetahui tujuan diadakannya kolaborasi sehingga ada tanggungjawab untuk mencapai misi *zero waste* dan mereka juga berkomitmen untuk tujuan tersebut sehingga sampah dapat selalu terolah dan berkelanjutan sampai saat ini.

3. *Governance*

Praktik *governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sudah tinggi. Dalam implementasi pengelolaan sampah sudah ada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang membuat manajemen pengelolaan sampah yang baik dan tentunya dapat dilakukan secara *sustainable*.

4. *Information sharing*

Information sharing yang ada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sudah sangat tinggi dimana informasi mengenai pengelolaan sampah disampaikan ke berbagai pihak dengan menggunakan berbagai media sehingga dapat memberikan edukasi atau pengetahuan kepada pihak yang terlibat maupun kepada masyarakat umum.

Berdasarkan penelitian *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, maka terdapat implikasi dari penelitian yang sudah dilakukan dan dijelaskan di atas antara lain :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan ilmu pengetahuan bahwa pendekatan *collaborative governance* dapat digunakan sebagai alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah lain yang memiliki permasalahan sampah dan hendak mengaplikasikan konsep atau pendekatan yang sama dengan Kabupaten Banyumas. Dengan penelitian ini dapat

menjadi referensi bahwa perlu memperhatikan beberapa indikator keberhasilan yang ada di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Z. Al. (2017). *Solid waste management in Saudi Arabia : A review*. May 2016.
- Amelinda, A. D., & Kriswibowo, A. (2021). *Collaborative Governance In Waste (Study In The Integrated Waste Management Site Of Tambakrejo Area , Sidoarjo Regency)*. 19(1), 29–40.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory* 18:543-571.
- Bahraini Amanda. (2022). *Ambisi Banyumas menuju Zero Waste: Dari TPST, Salinmas, ke Jeknyong*.
- BPS Provinsi Jawa Tengah <https://jateng.bps.go.id/indicator/152/424/1/persentase-komposisi-jenis-sampah-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>
- Budisetyowati, D. A. (2017). *Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik*. UMJ.
- Chaerul M., Tanaka M., Shekdar A.V. (2007). *Municipal solid waste management in indonesia: status and the strategic actions*. *Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University*, 12 (I): 41-49.
- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Selatan, A. (2021). *Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim Di Kepulauan Seribu*. 27(3), 348–376.
- Danang Aji Kurniawan, D. A. K., & Ahmad Zaenal Santoso, A. Z. S. (2021). *Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang*. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.247>

- Darmasaputra, A. B. D. H. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.
- Deseve, Edward. (2009). *Integration and Innovation in the Intelligence Community : The Role of a Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks*. Washington DC : Ash Institute for Democratic Governance and Innovation Harvard University.
- Donahue, John D. & Richard J. Zechauser, 2011, *Collaborative Governance: provate roles for public goals in turbulent times*. New Jersey: Princenton University Press.
- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahrirah, T., Ahmad, Y., & Yanuar, Z. (2016). *Analysis Of Waste Management In The Village Of Disanah , District Of Sreseh*. 368–375
- Fadliah Nurimna, Fatmawati, Parawy Hafiz Elfiansyah. (2021). *Implementasi Kebijakan Persampahan Berbasis Collaborative Governance di Kota Makassar*. Journal Public Policy anda Management.
- Fatmawati Andi Mappasere. (2019). *Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dalam pengelolaan sampah*. Makassar: Global RCI Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Habsari, D. R. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan*. EJournal Administrative Reform, 4(1).
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Darmi, T. (2021). *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten bengkulu selatan*. 2(2).
- Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2020). *Praktik Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah*. 2(1), 34–40.
- Holzer, Marc, et al. (2012). *An Analysis of Collaborative Governance Models the Context of Shared Services*. Dalam Laur Schachter, Hindy Kaifeng, Yang (Ed). The State of Citizen Participation in America. (PP. 349-386). Charlotte: Information Age Publishing.
- Hoogerwerf. 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga.
- Idris. Herdiana Dian, Mujtahid Iqbal Miftakhul. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna*. 6(3), 9810–9819.
- Ikram, M. (2020). *Pendekatan collaborative governance dalam pengelolaan sampah pada bank sampah kecamatan manggala*. Jurnal fair value. 3(1), 94–110.
- J Pramono. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta. Unisri Press.
- Kardono. (2007). *Integrated Solid Waste Management in Indonesia*. Proceedings of International Symposium on EcoTopia Science 2007. ISETS07: 629-633
- Kusnoputranto, H., Ayuningtyas, N. V., Purnamasari, O., & Riski, M. (2020). *Waste Management Program to Create Zero Waste in School Level : Communication , Information , and Education (CIE) and Participation Methods*. 11(6), 1267–1272.
- Mazmanian, D.A., & Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Foresman and Company.
- Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosyadakarya
- Muhamad, R., & Febiana, R. M. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

- Setyawan, Dharma Salam. (2004). *Otonomi Daerah dalam perspektif lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Djambatan. Jakarta.
- Sinaga, P. I. D. (2017). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan)*. *Jom Fisip Ur*, 4(2).
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dalam <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif DAN R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tachjan, (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit : AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad Bandung
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Vigoda-Gadot, E. (2002). *Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis (Public Administration & Public Policy)* (E. Vigoda-Gadot (ed.)). Routledge.
- Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaikat, Y. (2019). *Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang*, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2), 1–17. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24626
- Wahyuning, N., Mumpuni, R., & Kusumawati, M. P. (2021). *Good governance pengelolaan sampah : komitmen negara terhadap lingkungan hidup*. 79–89. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5725>
- Weber, E. P., Lovrich, N. P., & Gaffney, M. (2005). *Collaboration, Enforcement, and Endangered Species: A Framework for Assessing Collaborative Problem-Solving Capacity*. *Society and Natural Resources*, 18(8), 677–698. <https://doi.org/10.1080/08941920591005034>
- Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaikat, Y. (2019). *Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang*, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2), 1–17. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24626
- Zainuddin, M., & Salman, R. N. (n.d.). *Studi Kolaborasi Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Limbah Sampah Masyarakat di Desa Karossa Mamuju Tengah*. 1(1), 14–24.